PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 14 November 2012 Halaman: 11

Sekda Otomatis Pimpin BPBD Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta telah mencapai tahap akhir. Setelah sekian tahun eksekutif dan legislatif membahas badan yang akan dibentuk ini, Senin (12/11) lalu akhirnya dicapai kesepakatan draft Raperda Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tata Kerja BPBD, dan akan segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Senin (19/11) mendatang.

"Harapan warga Yogya akan terwujudnya lembaga otonom yang khusus menangani kebencanaan akan segera terwujud, sehingga penanganan bencana akan lebih komprehensif," ucap Fokki kepada *Tribun Jogja*, Selasa (13/11).

Panitia Khusus (Pansus) BPBD, Antonius Fokki Ardianto, menjelaskan eksekutif maupun legilatif telah sepakat membentuk BPBD dengan tipe A sesuai dengan rekomendasi legislatif selama ini. Artinya penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat masuk dalam fungsi penanggulangan bencana yang menjadi ikon dr BPBD ini.

"Sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No.3/2008 tentang pedoman pembentukan BPBD maka dalam Perda ini juga disepakati bahwa Sekda Kota Yogyakarta menjadi Kepala BPBD," jelas Fokki.

Pengesahan Raperda BPDB juga akan berimbas langsung terhadap pengesahan APBD 2013. Anggaran BPDB harus sudah tersedia pertanggal 1 Januari 2013 untuk menopang program-program kelembagaan BPBD sebagai pengganti PKB Linmas.

Pasalnya, dengan disepakatinya draft Raperda tersebut, maka Perda No.10/2008 tentang Satuan Kedudukan dan Tugas Pokok Ketenagakerjaan Pasal 2 angka 8, Bab IX pasal 23, 24 dan 25 tentang ketentuan yang mengatur mengenai fungsi penanggulangan kebakaran bencana dan perlindungan masyarakat pada kantor PKB Linmas dicabut.

"Jika tidak, maka masyarakat terancam tidak punya anggaran dalam hal kebencanaan, kebakaran dan linmas," tandas Fokki.

Rencananya, akan ada uji publik Raperda BPBD pada 14 November sebelum diparipurnakan menjadi Perda pada 19 November 2012."Bila nanti disahkan, maka Perda ini merupakan Perda yang monumental lantaran hanya Kota Yogyakarta dari seluruh Indonesia yang pembentukan Perda BPBD berasal dari inisiatif DPRD," ucapnya.

Januari Terbentuk

Menanggapi hal tersebut, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya mengaku sepakat dengan keputusan BPBD tipe A. Ia berharap, Januari 2013 BPBD sudah terbentuk dan langsung melakukan kegiatan.

"Nantinya Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat (KPKB-Linmas) akan terintegrasi ke dalam BPBD, dengan dikepalai oleh Sekda sebagai *ex officio* Ketua BPBD Yogyakarta. Hanya saja, ketua pelaksananya tetap setara dengan pejabat eselon IIB," urai Aman, Selasa (13/11).

Saat ini, pihaknya tinggal melakukan proses lanjutan berupa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelum disahkan melalui sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta. **(esa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. 3. Kantor Penanggulangan Kebakara	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005